



# MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv>, E-mail: [sekretariat@mui.or.id](mailto:sekretariat@mui.or.id)

## TAUSIYAH MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG

### PENTINGNYA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA

Nomor: Kep-30/DP-MUI/III/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencermati dengan penuh keprihatinan perkembangan situasi geopolitik internasional, khususnya meningkatnya eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah yang dipicu oleh serangan militer antara sejumlah negara. Perkembangan tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan yang lebih luas serta membawa dampak kemanusiaan, politik, dan keamanan global yang tidak ringan.

Dalam perspektif ajaran Islam, tindakan agresi terhadap kedaulatan suatu bangsa dan negara tidak dapat dibenarkan, baik ditinjau dari prinsip-prinsip syariat, norma kemanusiaan universal, maupun kaidah hukum internasional. Oleh karena itu, setiap pihak hendaknya mengedepankan prinsip pengendalian diri, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta upaya penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat.

Dengan memohon pertolongan dan bertawakkal kepada Allah SWT, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan tausiyah dan sikap sebagai berikut:

1. **MUI menghargai dan mendukung komitmen seluruh negara di dunia** untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara lain sebagai fondasi penting bagi terwujudnya stabilitas dan perdamaian dunia, khususnya di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah yang semakin kompleks.
2. **MUI mengingatkan bahwa hak membela diri tidak boleh melampaui batas-batas kemanusiaan dan moralitas.** Dalam ajaran Islam, tindakan melampaui batas (الاعتداء / *al-i'tidā'*) dilarang keras. Oleh karena itu, setiap pihak yang berada dalam situasi konflik hendaknya tetap menjaga prinsip proporsionalitas, melindungi masyarakat sipil, menjaga kehormatan umat, serta menghormati kedaulatan negara lain dan membangun hubungan bertetangga yang baik (*husn al-jiwār*).
3. **MUI menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban masyarakat sipil serta kerusakan fasilitas publik** sebagai dampak meningkatnya eskalasi konflik di kawasan teluk Arab. Untuk itu MUI menyerukan kepada seluruh pihak agar menahan diri, mengedepankan dialog, diplomasi, serta penyelesaian damai demi kemaslahatan umat manusia dan stabilitas dunia. Upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan (المسؤولية الدينية / *al-mas'ūliyyah ad-dīniyyah*) serta tanggung jawab kebangsaan (المسؤولية الوطنية / *al-mas'ūliyyah al-waṭaniyyah*), sejalan dengan cita-cita luhur perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. **MUI mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan dan keamanan al-Ḥaramain**, yaitu dua kota suci Makkah dan Madinah. Kesucian dan keamanan kedua kota tersebut merupakan amanah besar umat Islam sedunia yang harus dijaga bersama, dan karenanya tidak boleh menjadi objek konflik atau tindakan yang dapat mengganggu kesakralannya sebagai tempat ibadah umat Islam sedunia dalam menunaikan ibadah haji.

5. **MUI menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas dan ukhuwah antarnegara Muslim**, melalui komunikasi yang konstruktif, kerja sama yang erat, serta sikap kewaspadaan terhadap berbagai provokasi dan upaya adu domba yang dapat memperkeruh hubungan di antara negara-negara Muslim.
6. **MUI mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk terus memainkan peran aktif dan konstruktif** dalam diplomasi internasional guna mendorong terciptanya perdamaian yang berkeadilan, termasuk memperkuat komitmen masyarakat internasional terhadap prinsip-prinsip multilateralisme serta kepatuhan pada berbagai traktat dan kesepakatan internasional yang disepakati dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
7. **MUI juga mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)** agar secara lebih tegas menegakkan prinsip keadilan internasional dan mengambil langkah yang proporsional terhadap setiap tindakan yang melanggar kedaulatan negara serta mengabaikan kesepakatan internasional.

Demikian tausiyah ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong terwujudnya perdamaian dunia, keadilan internasional, serta kemaslahatan umat manusia.

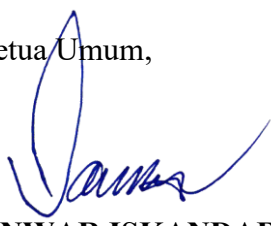
Semoga Allah SWT senantiasa membimbing umat manusia menuju jalan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan.

والله ولي التوفيق والهداية

Jakarta, 15 Ramadhan 1447 H/5 Maret 2026 M

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

  
**K.H. ANWAR ISKANDAR**



Sekretaris Jenderal,

  
**BUYA AMIRSYAH TAMBUNAN**